

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mensyaratkan adanya dukungan personil, peralatan dan pembiayaan (keuangan) yang cukup memadai. Dengan dipenuhinya tiga syarat di atas, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan, sekaligus dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, perkembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah (Asmuruf et al., 2015).

Dalam proses menuju kemandirian daerah otonomi menjadi hal utama dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dimana masih terbilang kecil. Kenyataan ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD setiap provinsi indonesia.

Adapun perkembangan PAD dalam waktu selama 7 tahun yang lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan PAD di Indonesia Tahun 2015 - 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (dalam triliun rupiah)	Persentase PAD (dalam persen)
2015	127.571	6%
2016	147.464	16%
2017	149.308	1%
2018	158.847	6%
2019	169.025	6%
2020	148.720	-12%
2021	165.169	11%

Sumber : APBD (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa perkembangan PAD selama kurun waktu 2015 hingga 2021 masih terlihat berfluktuasi bahkan persentase perkembangannya masih sangat kecil hanya mencapai kurang dari 20%. Tahun 2015 PAD Indonesia tercatat sebesar Rp 127.571 triliun, kemudian mengalami peningkatan sangat tajam di tahun 2016 bahkan peningkatannya mencapai 16% yaitu sebesar Rp 147.464 triliun, selanjutnya perkembangan PAD Indonesia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp. 169. 025 triliun, perkembangan PAD yang terus meningkat menggambarkan kondisi Indonesia yang cukup baik.

Namun tidak betahan lama di tahun 2020 terjadi penurunan PAD yang sangat besar bahkan turun mencapai -12%, penurunan ini sendiri merupakan dampak pandemi covid yang terjadi di Indonesia, dimana pada masa tersebut perekonomian mengalami kelumpuhan sehingga penerimaan daerah juga ikut menurun menjadi Rp 148.720 triliun. Selanjutnya tahun 2021 pasca pandemi covid perekonomian Indonesia perlahan mulai bangkit dan pulih, hal ini di tandai dengan mulai terjadi peningkatan PAD menjadi Rp 165.169 triliun.

Pendapatan Asli Daerah berkaitan erat dengan jumlah penduduk, artinya semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja akan meningkat, hal itu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah.

Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Atmaja dalam Mayza Miragustia, et. al. (2015) bahwa besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Adapun perkembangan jumlah penduduk Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (dalam Juta Jiwa)	Persentase (dalam persen)
2015	255.588	4%
2016	258.497	1%
2017	261.356	1%
2018	264.162	1%
2019	266.912	1%
2020	269.603	1%
2021	274.708	2%

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa selama 7 tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk Indonesia tumbuh positif dengan rata – rata

persentase pertumbuhan mencapai 2%. Tahun 2015 tercatat sebanyak 255.588 juta jiwa kemudian meningkat tahun 2016 mencapai 258.497 juta jiwa. Selanjutnya pertumbuhan penduduk terus maju hingga tahun 2021 tercatat ada sebanyak 274.708 juta jiwa. Apabila di perhatikan perkembangan jumlah penduduk dari persentasenya masih terbilang kecil hal ini karena peningkatan persentase jumlah penduduk masih dibawah 5%. Bahkan selama 7 tahun terakhir persentase jumlah penduduk terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu mencapai 4%.

Dalam mengelola pembangunan daerah untuk dapat menghasilkan PAD, pemerintah tentu harus memiliki modal yang tidak sedikit. Berbagai potensi daerah seharusnya menjadi peluang untuk menarik para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Utami, 2011).

Adapun pengertian investasi atau penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan adanya investasi, pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan modal yang nantinya digunakan untuk membiayai infrastruktur pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini tentu saja akan membawa perubahan bagi daerahnya dengan PAD yang meningkat. Adapun perkembangan penanaman modal dalam negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia

Tahun	PMDN (dalam miliar rupiah)	Persentase (dalam persen)
2015	179.466	5%
2016	216.231	20%
2017	262.351	21%
2018	328.605	25%
2019	386.498	18%
2020	413.536	7%
2021	447.064	8%

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa perkembangan PMDN di Indonesia sejak 2015 hingga 2021 terus tumbuh positif. Tahun 2015 tercatat hanya 5% pertumbuhan PMDN, selanjutnya meningkat pesat di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 216.231 miliar rupiah dengan pertumbuhan mencapai 20% pada tahun tersebut.

Pertumbuhan PMDN terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 pertumbuhan PMDN menurun menjadi 18% meskipun secara jumlah PMDN mengalami kenaikan dari Rp 328.605 miliar menjadi Rp 386.498 miliar. Selanjutnya sejak tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan PMDN sangat kecil hanya berkisar 6 hingga 7 persen.

Kinerja keuangan juga dapat dipengaruhi oleh komponen dalam laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yaitu belanja modal, hal ini dikarenakan semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan PAD melalui pungutan bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik bersumber dari dana alokasi anggaran belanja modal dalam APBD. Adapun perkembangan anggaran belanja modal dapat di lihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 1.4
Perkembangan Belanja Modal di Indonesia

Tahun	Belanja Modal (dalam triliun rupiah)	Persentase (dalam persen)
2015	45.154	0%
2016	44.714	-1%
2017	47.355	6%
2018	51.519	9%
2019	50.519	-2%
2020	33.655	-33%
2021	40.491	20%

Sumber : DJPK, 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa perkembangan anggaran belanja modal mengalami perkembangan berfluktuasi setiap tahunnya seperti tahun 2015 tercatat anggaran belanja modal sebesar 45.154 triliun lalu menurun di tahun 2016 menjadi 44.714 triliun dengan persentase penurunan minus 1%, di tahun 2017 tumbuh mencapai 6% menjadi 47.355 triliun. Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tajam menjadi 33% hal ini di akibatkan karena dampak covid-19, penurunan tersebut hanya menjadi 33.655 triliun.

Jika dikaji kaitannya terhadap pendapatan asli daerah maka di temukan fenomena menarik dalam penelitian ini pada tahun 2016 dimana nilai Belanja Modal menurun dari tahun sebelumnya menjadi 44.714 triliun rupiah sedangkan pada sisi Jumlah Penduduk, maupun PAD mengalami peningkatan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan teori sebagaimana yang disebutkan bahwa semakin tinggi belanja modal akan membuat PAD meningkat, dan saat belanja modal menurun tentu membuat PAD juga ikut menurun bukan meningkat.

Fenomena selanjutnya terjadi di tahun 2020 dimana jumlah penduduk meningkat pesat hingga mencapai 269.603 ribu jiwa, PMDN juga ikut naik hingga mencapai 413.536 miliar rupiah namun pada sisi PAD mengalami penurunan mencapai 20.305 triliun rupiah, hal ini juga tidak sejalan dengan teori yang

menyatakan bahwa dengan adanya sokongan investasi serta pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pendapatan wilayah tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah mengkaji tentang faktor –yang mempengaruhi PAD diperoleh hasil yang bervariasi diantaranya Darwanis & Ryanda, (2014) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ririn et al., (2014) menyatakan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi PAD. Lalu penelitian Julfiansyah, (2013) menyatakan jumlah penduduk maupun penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini menjadi menarik di teliti karena fokus dalam penelitian adalah faktor yang mempengaruhi PAD terdiri dari jumlah penduduk, PMDN, dan belanja modal yang ada pada 34 provinsi dengan menggunakan model analisis data panel, sedangkan penelitian terdahulu cenderung meneliti pada satu wilayah seperti provinsi, atau Kab/Kota dengan menggunakan model regresi berganda atau data dinamis. Penggunaan model data panel bertujuan agar diperoleh hasil lebih akurat dengan adanya rincian pada masing – masing wilayah atau provinsi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang “**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia?
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri Berpengaruh Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia?
3. Apakah Belanja Modal Berpengaruh Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia?
4. Apakah Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Modal Berpengaruh Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia.
2. Mengetahui Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia.
4. Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Modal Terhadap PAD di 34 provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat untuk semua pihak diantaranya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjadi bahan dan ilmu pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan, pengetahuan serta mampu menerapkan teori maupun pengaplikasian yang diperoleh selama di bangku kuliah
2. Menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi pihak akademik terkait maupun peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang pendapatan asli daerah dan faktor yang mempengaruhinya, atau dapat menambahkan variabel lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap PAD.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan dalam bidang ekonomi pembangunan terutama konsentrasi publik tentang perkembangan PAD terutama 34 provinsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan saran bagi pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di 34 provinsi dan dapat menjadi perhatian lebih untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui kondisi perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah Indonesia, terutama masing – masing provinsi setiap daerahnya.